

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PELAKSANAAN TUGAS PENDIDIKAN DAN
PENGAJARAN DENGAN PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE SYSTEM
(STUDI ATAS DELIK ADUAN ORANGTUA SISWA DI KEPOLISIAN RESORT
MAROS)**

Nugraha Ahmad Fadel¹, Hasnawi Haris², Firman Muin
^{1,2,3} PPKn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar

Email:Nugrahaahmadfadel@gmail.com

ABSTRAK.

Penelitian ini bertujuan,(1) Untuk mengetahui strategi kepolisian Resor Maros sebagai mediator dalam menyelesaikan aduan orangtua siswa dalam pelaksanaan tugas pendidikan dan pengajaran di Kab.Maros (2) Untuk mengetahui efektifitas proses mediasi kepolisian resort Maros atas delik aduan orangtua siswa dalam pelaksanaan tugas pendidikan dan pengajaran di Kab.Maros.Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui dokumentasi,observasi dan wawancara.Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa.(1) Strategi mediator yang dalam hal ini unit Pelayanan Perempuan dan anak (PPA) Sat Reskrim Polres Maros dalam mediasi kasus aduan orangtua siswa dalam pelaksanaan tugas pendidikan dan pengajaran adalah memaksimalkan proses mediasi dengan cara memberikan nasehat serta pertimbangan sebelum mengambil keputusan yang dimana sebelumnya dilakukan penjelasan kepada pihak yang berperkara secara bergantian.(2) Efektifitas mediasi di Kepolisian Resor Maros yaitu sangat efektif karena semua aduan yang masuk terkait aduan orangtua siswa dalam pelaksanaan tugas pendidikan dan pengajaran di Kab.Maros berhasil di mediasi.

KATA KUNCI : PERLINDUNGAN HUKUM, PENDIDIKAN, RESORATIVE JUSTICE

PENDAHULUAN

Tuhan telah menciptakan manusia di muka bumi ini dan memerintahkan kepada seluruh umat manusia sejak kecil hingga dewasa untuk menuntut ilmu.Menuntut ilmu diwajibkan bagi semua manusia untuk memerangi kebodohan dalam upaya menciptakan dan merubah sebuah peradaban yang dianggap menyimpang dari peradaban-peradaban sebelumnya.

Dalam hakikat kemanusiaan sebagaimana yang telah dikemukakan oleh seorang filsuf bahwa manusia adalah “*zoon politicon*” yang dimaksudkan

bahwa manusia merupakan makhluk sosial, yang secara kodrati manusia diciptakan untuk bermasyarakat dan berinteraksi satu sama lain. Namun bukan sebatas bermasyarakat dan berinteraksi manusia juga diharapkan untuk bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya.

Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat disebutkan mengenai dasar dan landasan Negara Indonesia yaitu Pancasila. Melalui Pembukaan Undang-Undang tahun 1945 tersebut, dapat dijelaskan bahwa salah satu tujuan Negara Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Artinya Negara hadir dan sangat mengharapkan agar anak-anak Indonesia terlepas dari lingkaran dan kejamnya kebodohan.

Secara spesifik Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat(1), menyebutkan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

Sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian pendidikan di atas, guru dan peserta didik merupakan elemen pendidikan yang sangat penting untuk mewujudkan tujuan pendidikan di atas, Korelasi antara guru dan peserta didik sangat diharapkan untuk mengembangkan peradaban masyarakat Indonesia kedepannya. Namun dalam pengaplikasian untuk mewujudkan pendidikan yang diharapkan, terkadang terjadi benturan antara dua elemen penting ini dimana dalam upaya mewujudkan tujuan sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian pendidikan di atas.

Dalam masyarakat, guru selalu diharapkan dan diberikan tanggung jawab yang besar sebagai pendidik di lingkungan sekolah. Guru sebagai pendidik bukan berarti hanya berada dalam ruangan 8X8 M. Juga di luar kelas, guru berperan aktif memberikan petunjuk dan ajarannya kepada seluruh siswa yang ada di sekolah sebagai agen perubahan Indonesia kedepannya.

Posisi guru terkadang mendapat sanjungan dari masyarakat sebagai *Pahlawan Tanpa Tanda Jasa*, namun terkadang pula posisi guru mendapatkan hujatan dari berbagai arah terkait dengan rendahnya mutu pendidikan di Indonesia. Apalagi akhir-akhir ini maraknya kriminalisasi terhadap guru yang kerap kali menghiasi media-media massa baik cetak maupun elektronik. Upaya guru dalam menciptakan generasi penerus bangsa yang cerdas dan beretika terkadang mendapat perlakuan yang kurang mengenakkan dari pihak siswa maupun orangtua siswa yang mereka anggap bahwa apa yang dilakukan oleh sang guru terlalu berlebihan. Contohnya Guru Malayanti dilaporkan ke polisi karena mencubit siswa di SMA Negeri 3 Wajo saat kelas kewirausahaan pada 6 November 2017. Saat penyampaian materi, seorang siswa bermain ponsel dan diingatkan Mala dengan mencubit lengan siswanya. Begitupun dengan yang terjadi pada awal tahun 2019, Seorang guru di Kabupaten Maros dilaporkan ke polisi oleh muridnya sendiri. Guru Bimbingan Konseling (BK) bernama Ahmad dilaporkan oleh Hamka, pelajar SMP Negeri 21 Tompobulu, Kabupaten Maros. Ahmad dilaporkan setelah menegur Hamka yang sedang merokok di lingkungan sekolah.

Kehadiran UU No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak dianggap sebagai awal dari kemunculan kriminalisasi terhadap guru. Pasal 54(1) menyatakan bahwa Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. Eksistensi pasal ini menjadi dasar hukum bagi siswa maupun orangtua yang bersangkutan untuk melakukan pengaduan kepada pihak yang berwajib dalam hal ini pihak kepolisian setempat.

Keadaan ini menimbulkan dilema besar bagi seorang guru dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pendidik ditambah kepercayaan penuh oleh masyarakat yang disematkan pada pundak seorang guru. Di satu sisi mereka selalu dituntut untuk mencerdaskan anak bangsa dengan cara menegakkan disiplin dan tata tertib di sekolah. Namun di lain sisi, guru juga khawatir bilamana dalam upaya pendisiplinan siswa di anggap tidak wajar dan tabuh oleh siswa, orangtua maupun LSM yang membela anak tersebut yang menganggap hal itu sebagai kekerasan di sekolah.

Jika pada proses pendidikan masa silam sekitar tahun 80-an mungkin kita masih mendengar hukuman yang diberikan oleh guru mungkin lebih dari ini semua, para siswa masih ada yang mengalami hukuman diberdirikan di depan kelas, kemudian dipukul pakai penggaris kayu karena tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Anehnya pada zaman itu, kejadian tersebut dapat ditemukan dimanapun namun tak ada satupun orangtua yang komplain ataupun mengadu kepada pihak kepolisian. Bahkan orangtua mendukung penuh dan mengannggap bahwa hal ini lumrah dalam rangka mendidik dan mendisiplinkan siswa. Namun mungkin sangat rawan kiranya jika proses pendidikan seperti masih dilakukan hari ini.

Hal ini dapat berpengaruh besar bagi pendidikan Indonesia kedepannya. Menjadi masalah besar jika nantinya guru hanya menjadi pengajar dan menjadikan mengajar hanya sebatas penggugur kewajiban saja dikelas tanpa menghiraukan lagi etika, perilaku dan sopan santun yang masih menjadi tugas seorang guru. Dan akhirnya wibawa guru hilang dari mata siswa, mereka semakin menjadi-jadi dan seenaknya melanggar tata tertib dan peraturan di sekolah.

Berkaitan dengan hal di atas pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan seharusnya hadir dan merealisasikan UU No.14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dimana didalamnya diatur tentang perlindungan hukum bagi guru dalam pelaksanaan tugas. Agar guru senantiasa aman, nyaman dan tenang dalam menjalankan tugas profesinya.

Maraknya kasus kriminalisasi terhadap guru akhir-akhir ini, diharapkan tidak menjadi ironi bagi pendidikan Indonesia kedepannya. Dukungan berbagai pihak baik orangtua, masyarakat dan pemerintah sangat diharapkan bagi kemajuan pendidikan Indonesia kelak.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Mediasi Sebagai Upaya Damai

Restorative justice sudah sangat jauh berkembang. dalam 25 tahun terakhir, *restorative justice* telah menjadi dinamika reformasi peradilan pidana di seluruh dunia. Lebih dari 80 negara menggunakan beberapa bentuk praktek restoratif dalam menangani kejahatan. *Restorative justice* telah membuktikan ekspansi yang sangat cepat mengenai praktik-praktik restoratif dan peningkatan popularitas mengenai gagasan-gagasan restoratif. Dalam beberapa tahun terakhir, ide-ide restoratif telah mempengaruhi kebijakan dan praktik peradilan pidana serta reformasi legislasi di seluruh dunia.

Mediasi oleh kepolisian merupakan bagian dari *Restorative Justice* atau keadilan restorasi. *Restorative Justice* atau Keadilan restorasi adalah suatu pendekatan yang lebih menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri, mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi korban dan pelaku..

Jadi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) setelah disahkan memungkinkan adanya mediasi penal pada tingkat penyidikan sebagai alasan penyidik menghentikan suatu perkara pidana.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ("UU Kepolisian Negara Republik Indonesia") juga tidak diatur mengenai mediasi oleh pihak kepolisian. Mediasi oleh polisi dalam tataran di bawah undang-undang, oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Prof.H.MUHAMMAD TITO Karnavian, Ph.D pada 27 Juli 2018 menandatangani Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrin) Polri pada tahun 2012 telah mengeluarkan **Surat Telegram Kabareskrim Nomor: STR/583/VIII/2012 tanggal 08 Agustus 2012 tentang Penerapan *Restorative Justice***, surat telegram tersebut yang dijadikan dasar penyidik dalam penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restoratif, hingga muncul **Surat Edaran Kapolri Nomor 7 tahun 2018 (SE/8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018) tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana**. Surat edaran Kapolri tentang *Restorative Justice* inilah yang selanjutnya dijadikan landasan hukum dan pedoman bagi penyelidik dan penyidik Polri yang melaksanakan penyelidikan/penyidikan, termasuk sebagai jaminan perlindungan hukum serta pengawasan pengendalian, dalam penerapan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam konsep penyelidikan dan penyidikan tindak pidana demi mewujudkan kepentingan umum dan rasa keadilan masyarakat, sehingga dapat mewujudkan keseragaman pemahaman dan penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) di Lingkungan Polri.

- Mekanisme penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*):
- 1. Setelah menerima permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor) yang ditandatangani diatas meterai, lakukan penelitian administrasi

syarat formil penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (restorative justice).

2. Permohonan perdamaian setelah memenuhi persyaratan formil terpenuhi diajukan kepada atas penyidik untuk mendapat persetujuan;
3. Setelah permohonan disetujui oleh atasan penyidik (Kabareskrim/Kapolda/Kapolres), kemudian ditetapkan waktu pelaksanaan penandatanganan pernyataan perdamaian;
4. Pelaksanaan konferensi yang menghasilkan perjanjian kesepakatan yang ditandatangani semua pihak terlibat;
5. Membuat nota dinas kepada pengawas penyidik atau kasatker perihal permohonan dilaksanakan gelar perkara khusus untuk penghentian perkara;
6. Melaksanakan gelar perkara khusus dengan peserta pelapor dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor, dan perwakilan dari tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh penyidik, penyidik yang menangani dan perwakilan dari fungsi pengawas internal dan fungsi hukum dan unsur pemerintah bila diperlukan;
7. Menyusun kelengkapan administrasi dan dokumen gelar perkara khusus serta laporan hasil gelar perkara;
8. Menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan/Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan/Penyidikan dengan alasan restorative justice;

Restorative justice dikatakan sebagai falsafah atau pedoman dasar dalam mencapai keadilan yang dilakukan oleh para pihak diluar peradilan karena merupakan dasar proses perdamaian dari pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban (keluarganya), akibat timbulnya korban/kerugian dari perbuatan pidana tersebut. Jadi dalam hal ini sangat dikehendaki yang namanya perdamaian dimana polisi bertindak sebagai mediator dengan harapan masalah atau perkara hanya sampai ke kepolisian dan berakhir dengan damai..

2. Pengertian Guru.

Menurut UU No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Menurut E. Mulyasa pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional..

3. Perlindungan Hukum Profesi Guru

Perlindungan akan harkat dan martabat,serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.

Undang-Undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 7(1) huruf h mengamanatkan bahwa guru harus memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.Selanjutnya secara rinci dibahas pada pasal 39,dan dinyatakan bahwa:

(1)Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas.

(2)Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

(3)Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain.

(4)Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas.

(5)Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatanlingkungan kerja, dan/atau risiko lain.Kemudian pada Pasal 40 PP Nomor 74 Tahun 2008 dijelaskan

pula bahwa: “Guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi profesi guru, dan/atau masyarakat sesuai kewenangan masing-masing. Rasa aman dan jaminan keselamatan tersebut diperoleh guru melalui perlindungan hukum, profesi dan keselamatan dan kesehatan kerja.”

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan dengan alasan bahwa peneliti akan langsung mengamati kondisi di lapangan berhubungan langsung dengan peserta didik. Pendekatan kualitatif adalah suatu metode penelitian dimana hasil penelitian lebih berkenan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau *human instrument*, yaitu peneliti itu sendiri

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kepolisian Resor Maros atau yang disingkat Polres Maros terletak di Jalan Jend. Ahmad Yani No.2 Maros Provinsi Sulawesi Selatan. Kepolisian Resor Maros membawahi 10 Polsek diantaranya Polsek Turikale, Polsek Lau, Polsek Mandai, Polsek Bantimurung, Polsek Kawasan Bandara, Polsek Camba, Polsek Mallawa, Polsek Tompobulu, Polsek Moncongloe dan Polsek Tanralili.

B. Hasil Penelitian

1. Peran Kepolisian Resor Maros sebagai Mediator atas Delik Aduan Orangtua Siswa dalam Pelaksanaan Tugas Pendidikan dan Pengajaran di Kab. Maros

a. Strategi mediator dalam Mediasi

Dari penuturan informan Brigpol Dedi Dirman Said, mengungkapkan bahwa tidak ada strategi khusus yang dilakukan oleh penyidik, karena yang dikhawatirkan penyidik bisa saja berpihak, hanya saja penyidik selalu berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak terutama terkait masalah yang berkaitan dengan pendidikan terkhusus masalah yang terjadi dalam proses pembelajaran

dalam kelas. Sebagaimana Hukum pidana dalam konteks *ultimum remedium* sebagai asas hukum yang menempatkan Hukum Pidana sebagai alat terakhir dalam penegakan Hukum. Walaupun demikian, keputusan tetap berada pada kedua belah pihak untuk berdamai atau tetap melanjutkan proses hukum yang berlaku.

Adanya kasus tunggakan atau kasus yang tidak selesai atau yang dapat membuat tersangka bebas dari hukum adalah apabila dihentikan penyidikan atas tersangka. Alasan-alasan penghentian penyidikan dapat dijelaskan berdasarkan pasal 109 ayat (2) KUHAP, yakni:

"Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya."

Dari penuturan Brigpol Dedi Dirman Said, dapat dikatakan bahwa proses mediasi merupakan aib keluarga sehingga beliau selaku mediator memiliki strategi yakni melakukan proses mediasi dengan cara tertutup sehingga apa yang menjadi sesuatu yang mengganjal di hati dapat diungkapkan dalam proses mediasi dan juga menurutnya proses mediasi juga membutuhkan persiapan, sehingga memberikan kedua belah pihak waktu untuk berbicara baik-baik dan mempertimbangkan dampak yang akan ditimbulkan.

Dari Informasi yang didapatkan dari Aipda Hatijah Lanteng, dimana menurutnya setiap mediator seharusnya memiliki keinginan yang besar untuk mendamaikan kedua belah pihak disamping kewenangan yang diberikan terbatas. Juga dalam ruang mediasi, tidak menutup kemungkinan pihak terkait tersulut emosinya sehingga untuk meredam emosinya, mediator biasanya memberi waktu para pihak untuk meminum air yang dibawa ataupun yang disediakan di ruangan dan dimintai untuk menarik nafas terlebih dahulu sebab cara tersebut menurutnya berfungsi untuk meregangkan urat yang tertarik akibat emosi sehingga dapat melakukan mediasi kembali dengan baik agar tercipta perdamaian dari kesalahpahaman ataupun perselisihan yang terjadi pada kedua belah pihak.

b. Faktor keberhasilan Mediasi:

Faktor-faktor keberhasilan dari mediasi adalah:

- 1) Faktor kesadaran, artinya ada kesadaran masing-masing pihak untuk berdamai.

- 2) Aktifnya para pihak yang berperkara dalam mengikuti proses mediasi, sehingga sering mendapatkan pertimbangan dari mediator saat mediasi berlangsung.
- 3) Kesiediaan pihak terlapor untuk memenuhi keinginan pihak pelapor, agar kedua belah pihak tidak saling memberatkan dan terjalin rasa kekeluargaan.
- 4) Kemampuan mediator dalam menjelaskan dengan baik tugas dan fungsi guru dalam dunia pendidikan dan mengajak pelapor untuk merefleksi kembali pendidikan sebagaimana yang telah dilewati pelapor dalam hal ini orangtua siswa. "Mediasi adalah pilihan terakhir untuk berdamai sehingga mediator dalam hal ini penyidik, selalu mengupayakan untuk kedua belah pihak yang berperkara untuk berdamai sehingga dalam proses mediasi harus memiliki daya tarik tersendiri dan kenyamanan dalam mediasi seperti:
 - 1).Tempat yang cukup luas dan mendukung untuk dilakukan mediasi, sehingga ruangnya terlihat istimewa dan pihak yang akan dimediasi akan terasa nyaman.
 - 2).Penggunaan AC yang membuat kesejukan dalam ruang mediasi.
 - 3).Perawatan terhadap fasilitas dan sarana tetap dilakukan dengan baik dan melakukan evaluasi di setiap bulannya.
 - 4).Kemampuan mediator dalam hal ini penyidik beretorika dengan baik sehingga maksud dan tujuan yang diharapkan akan terwujud dan terealisasi disamping keputusan pihak yang berperkara dalam mengambil keputusan.

c.Kendala Dalam Proses Mediasi

Adapun kendala-kendala yang dialami saat melakukan mediasi:

- 1).Waktu untuk mempertemukan kedua belah pihak yang berperkara,terkadang satu pihak bersedia di hari itu namun pihak yang lain tidak bersedia
- 2).jarak tempat tinggal pihak yang berperkara jauh dari tempat dilakukannya mediasi.
- 3).Keinginan pelapor yang terkadang sulit dipenuhi oleh pihak terlapor.

4).Emosi yang terkadang susah dikontrol dan membuat proses mediasi terhambat.

5).Tidak terlalu memahami fungsi dan manfaat dari mediasi itu sendiri

Hal yang senada diungkapkan dari hasil wawancara peneliti dengan informan Brigpol Dedi Dirman Said,yang menjelaskan bahwa:

“Kendala yang dialami penyidik biasanya, korban menuntut yang aneh-aneh terhadap terlapor, misalnya hanya luka memar dan pecah bibir namun menuntut biaya operasi sampai dengan lima juta rupiah”

Dari informasi yang didapatkan dari informan Brigpol Dedi Dirman Said, bahwa masih banyak korban atau orangtua korban yang masih saja memanfaatkan keadaan dengan memberi standar atau ganti rugi dalam perkara seperti ini, namun mediator selalu saja mengingatkan peran dan tugas guru di sekolah, sehingga orangtua paham dan mengerti keadaan tersebut.Dan dalam mediasi perkara seperti ini mediator selalu berupaya agar tercipta kerukunan dan perdamaian tanpa merugikan salah satu pihak manapun.

2. Efektifitas Proses Mediasi Kepolisian Resor Maros atas Delik Aduan Orangtua Siswa dalam Pelaksanaan Tugas Pendidikan dan Pengajaran di Kab.Maros

Mengacu dari pendapat informan yang dalam hal ini adalah BA Unit Reskrim,maka penulis menyimpulkan bahwa pengertian dari efektifitas adalah terjadinya hal-hal sesuai keinginan oleh para pihak tanpa adanya eksese-eksese dari pihak lain sebab bagaimanapun cara mediator untuk merukunkan keluarga yang sedang berselisih namun hal tersebut tergantung keputusan oleh para pihak yang sedang berperkara serta jika mengacu kepada teori konsep efektifitas untuk mengukur efektifitas mediasi di Kepolisian Resor Maros yang dimana ukuran keberhasilan mediasi perkara perceraian dilihat dari gugatan yang dicabut.

Kriteria dasar mengenai efektifitas yaitu jika output yang gagal berbanding output yang ditargetkan lebih besar atau sama dengan 1 (satu) maka akan tercapai efektifitas dan jika perkara yang gagal berbanding output yang ditargetkan kurang daripada 1 (satu), maka efektifitas tidak tercapai.

Data banyaknya perkara penganiyaan terhadap anak dalam pelaksanaan tugas pendidikan dan pengajaran yang terdaftar di Kepolisian Resor Maros berjumlah 3 perkara dan yang berhasil di mediasi atau berakhir

dengan perdamaian sebanyak 3 perkara,dengan kata lain seluruh perkara berhasil di mediasi.

Dari penuturan Brigpol Dedi Dirman Said selaku penyidik pembantu Sat Reskrim unit PPA Kepolisian Resor Maros yang sekaligus bertugas sebagai mediator terhadap perkara yang dimediasi,menjelaskan bahwa pihak kepolisian Resor Maros dalam hal ini penyidik telah memaksimalkan proses mediasi dengan maksimal,dari segi pelayanan maupun dalam proses pemanggilan kedua belah pihak yang berperkara.Memberikan kenyamanan dan rasa kekeluargaan kepada kedua belah pihak sebagai penengah atau pemberi solusi terkait dengan perkara yang terjadi.Namun keputusan akhir tetap dikembalikan kepada kedua belah pihak yang berperkara dan apabila tidak menemui kesepakatan maka dikembalikan kepada unsur pasal dan prosedur yang berlaku.

KESIMPULAN DAN SARAN

A.Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dimuat dalam pembahasan, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun strategi mediator dalam hal ini penyidik unit PPA Sat Reskrim Kepolisian Resor Maros adalah sebagai berikut:
 - a) Mediator melakukan sebuah pertemuan untuk menjelaskan kepada para pihak secara bergantian dan memberikan pertimbangan dan nasehat tentang perkaranya terutama pihak korban bahwa semua dilakukan demi kepentingan anak .
 - b) Memberikan waktu masing masing pihak untuk berdiskusi dengan keluarganya guna mempertimbangkan dampaknya sebelum di mediasi.Dan penyidik hanya berhak sebagai penengah, keputusan dikembalikan kepada kedua belah pihak.Karena mediasi tidak bisa berjalan apabila salah satu pihak terutama pihak pelapor menolak untuk di mediasi.
 - c) Penyidik menanyakan apa yang menjadi keinginan kedua belah pihak terutama pihak pelapor dan apakah terlapor bersedia mengikuti keinginan pelapor.Agar kedua belah pihak tidak saling memberatkan sehingga terjalin rasa kekeluargaan pada kedua belah pihak.
 - d) Penyidik selalu mengupayakan kondisi di dalam ruang mediasi tercipta ketenangan.Karena kedua belah pihak dapat menerima

secara baik penjelasan berupa nasehat dari penyidik sebab sulit seseorang menerima nasihat jika dalam keadaan emosi dan penyidik juga selalu berupaya menciptakan suasana yang menyenangkan agar para pihak bisa menerima masukan dengan baik.

- e) Menunjukkan charisma yang kuat serta retorika yang sangat baik sehingga pihak yang dimediasi dapat memahami betul substansi dari mediasi.
2. Efektifitas proses mediasi kepolisian resort Maros atas delik aduan orangtua siswa dalam pelaksanaan tugas pendidikan dan pengajaran di Kab.Maros adalah Sangat efektif, sebab mengacu dari teori efektifitas yang dimana jika output yang gagal berbanding output yang ditargetkan lebih besar atau sama dengan 1(satu) maka akan tercapai efektifitas dan jika perkara yang gagal berbanding output yang ditargetkan kurang daripada 1(satu), maka efektifitas tidak tercapai.Namun, pada tahun 2018 banyaknya perkara yang terdaftar ada 3 perkara dan hasilnya 3 perkara berhasil di mediasi tanpa ada satupun perkara yang berlanjut dalam proses hukum.Dari hal tersebut, maka peneliti menilai bahwa mediasi di Kepolisian Resor Maros sangat efektif sebab semua perkara aduan orangtua siswa dalam pelaksanaan tugas pendidikan dan pengajaran di Kabupaten Maros berhasil di mediasi.

B .Saran

1. Kepada Orangtua siswa agar lebih jeli dan lebih teliti dalam menerima aduan dari anaknya terkait dengan apa yang terjadi di sekolah.Orangtua harus mampu memberikan arahan ataupun penjelasan kepada anaknya dengan baik bahwa apa yang dilakukan oleh guru bukan semata-mata karena marah melainkan menjalankan tugasnya sebagai pendidik yang dimana tugasnya bukan hanya mengajar dalam kelas tetapi lebih dari itu semua.
2. Kepada aparat penegak hukum yang dalam hal ini pihak kepolisian agar kiranya dalam menangani sebuah perkara harus bermula dari *Presumption of innocence* (Asas Praduga tak bersalah), dan tidak melihat perkara dari satu sudut pandang saja serta selalu berupaya untuk menjadi penengah dalam perkara seperti ini karena kasus seperti ini terjadi karena hanya kesalahpahaman antara orangtua siswa(pelapor) dan guru (terlapor).Juga dalam hal pencatatan dalam

buku registrasi perkara agar dibuat dan ditulis dengan rapi terutama pada bagian kronologis kasusnya.

3. Kepada Pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar hadir dan merealisasikan UU No.14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2008 tentang Perlindungan terhadap profesi guru , dimana didalamnya diatur tentang perlindungan hukum bagi guru dalam pelaksanaan tugas.Agar guru senantiasa aman,nyaman dan tenang dalam menjalankan tugas profesinya.

4.Kepada tenaga pendidik (guru) dalam menjalankan tugas profesinya agar kiranya tetap meningkatkan profesionalisme, di tengah -tengah maraknya kriminalisasi guru dalam mendisiplinkan siswa yang dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks seiring dengan adanya perubahan cara pandang masyarakat atau orangtua yang secara sadar terpengaruh oleh doktrin perlindungan anak.Namun, guru harus tetap pada alurnya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

E.Mulyasa.2005. *Menjadi Guru Profesional*.Bandung: Rosda

FIS UNM. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*.Cetakan ke-1. Makassar;CV. Berkah Utami.

IsmuGunadi,dkk.2014.*Cepat dan Mudah memahami Hukum Pidana*.Jakarta:Kencana Prenadamedia Group

Kurniawan.2005.*Transformasi Pelayanan Public*.Bandung,hal 109

M.Marwan.2009.*Kamus Hukum,Dictionary of Law Complete Edition*.PT.Reality Publisher

Moeljatno.1993. *Azas-Azas Hukum Pidana*.Jakarta:Rineka Cipta

Momon Sudarma.2014.*Profesi Guru Dipuji,Dikritisi dan Dicaci*.Cetakan ke-2.Jakarta:PT Raja Grafindo Persada

Susilawetty.2013.*Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Perkara Ditinjau Dalam Perspektif Peraturan UU*,Bekasi:Gramata Publishing

Sumarthana.*Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*.Jakarta:Gramedia Pustaka Utama

Syahrizal Abbas.2009.*Mediasi:Dalam Perspektif Hukum Syariah,Hukum adat,dan Hukum Nasional*.Cet.I.Jakarta:Kencana Prenada Media,

Teguh Prasetyo.2015.*Hukum Pidana Edisi Revisi*.Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,h.50

Tim penyusun Kamus Pusat Bahasa.2002.*Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ketiga*.Cet.II.Jakarta:Balai Pustaka

Umbu Tagela Ibi Leba,dkk.2014.*Profesi Kependidikan*.Yogyakarta:Ombak

W.Head,Jhon.1997.*Pengantar Umum Hukum Ekonomi*.Jakarta:Proyek Elips

Wirdjono Prodjokoro.2014.*Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*.Cetakan ke-6.Bandung:PT.Refika Aditama

2. Peraturan Perundang-undangan

-UUD NRI Tahun 1945

-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP)

-Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

-Undang-Undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

-Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

-PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

-Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (restorative Justice) Dalam PenyelesaianPerkaraPidana.

3. Internet

Zulkipli Natsir”Guru di Sulsel Dipolisikan Karena Cubit Siswanya yang Main HP”.25 Maret 2019.<https://news.detik.com/berita/d-3752219/>

“Viral, Siswa SMP di Kabupaten Maros Laporkan Guru Usai Ditegur Ketahuan Merokok”.25 Maret

2019.<http://sumsel.tribunnews.com/2019/01/21/viral-siswa-smp-di-kabupaten-maros-laporkan-guru-usai-ditegur-ketahuan-merokok>

Tri Jata Ayu Pramesti”Bisakah Meminta Polisi Memediasi Masalah Hukum”.27 Maret2019.<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt574a375e41718/bisakah-meminta-polisi-memediasi-masalah-hukum/>